



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANDA SATRIADI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **922295**

II. DATA HARTA

		Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN		350.000.000	
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 93 m ² /21 m ² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI	Rp. 350.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		129.000.000	
1.	MOBIL, DAIHATSU SIGRA B401RS-GMQF J 1.2 X / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp. 115.000.000	
2.	MOTOR, YAMAHA NMAX 2DP-R A/T / SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 11.000.000	
3.	MOTOR, HONDA SPICY SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp. 3.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		---	
D. SURAT BERHARGA		---	
E. KAS DAN SETARA KAS		14.446.506	
F. HARTA LAINNYA		---	
Sub Total		493.446.506	
III. HUTANG		133.621.609	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		359.824.897	

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.